

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
MELALUI PERAN TIM ASESMEN TERPADU PADA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**

Oleh:
YUDHI HERLAMBANG
223309040029

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika melalui peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan jumlah penyalahguna mencapai 3,3 juta orang pada tahun 2023, UU Nomor 35 Tahun 2009 mengamanatkan pendekatan rehabilitatif, namun 90% penyalahguna tetap dipenjara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan empiris dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana telah bergeser dari represif-punitif menuju rehabilitatif-restoratif, namun implementasinya tidak efektif. TAT yang dibentuk melalui Peraturan Bersama tujuh lembaga negara tahun 2014 memiliki kedudukan strategis namun lemah secara normatif karena tidak diatur dalam undang-undang. Rekomendasi TAT bersifat tidak mengikat sehingga sering diabaikan, menyebabkan overcrowding lembaga pemasyarakatan dan disparitas putusan. Penelitian merekomendasikan reformulasi UU Narkotika dengan mengatur TAT secara eksplisit, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas TAT, transformasi budaya hukum aparat, dan harmonisasi dengan KUHP Nasional. Penguatan peran TAT secara normatif dan institusional merupakan kunci mewujudkan sistem peradilan pidana narkotika yang berkeadilan, humanis, dan efektif.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pengguna Narkotika, Tim Asesmen Terpadu, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif